

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ariwirawan, S. 2014. *Analisis Implementasi dan Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Arizona, Haibati. 2015. *Analisis Dampak Pengalihan Pengelolaan Pbb P2 Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang*. Padang : Univeritas Andalas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru. 2015. Pekanbaru Dalam Angka. Diakses dari <http://bappeda.pekanbaru.go.id>, pada tanggal 29 Juli 2015.

Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Indeks.

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Booklet PBB. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf>, pada tanggal 27 September 2015.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan : Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. 2012. *Analisa Dampak Pengalihan Pemungutan BPHTB Ke Daerah Terhadap Kondisi Fiskal Daerah*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.

Kota Pekanbaru. 2010. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pemerintah Daerah. Pekanbaru.

Kota Pekanbaru. 2011. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pemerintah Daerah. Pekanbaru.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Lestari, V. 2014. *Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013*. Skripsi. Universitas Negeri

Surabaya.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi.

Mentari, Prima. 2014. *Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Setelah dan Sebelum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah*. Skripsi. Padang : Universitas Andalas.

Nikijuluw, Ruth. 2012. *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten / Kota di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1945. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat